

Analisis Penyajian Laporan Keuangan Bumdes Mengacu pada KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022 (Studi Kasus Pada BUMDes Nugraha Tata Samaya di Desa Pejarakan)

I Ketut Suarsana*, Ni Kadek Sinarwati

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

*suarsana@undiksha.ac.id

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
17 Januari 2024

Tanggal diterima:
29 April 2024

Tanggal dipublikasi:
30 April 2024

Kata kunci: *Penyajian Laporan Keuangan, KepmenDesa PDTT No. 136 Tahun 2022, BUMDes Nugraha Tata Samaya.*

Pengutipan:

Suarsana, I Ketut & Sinarwati, Ni Kadek (2024). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Bumdes Mengacu Pada Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022 (Studi Kasus Pada Bumdes Nugraha Tata Samaya Di Desa Pejarakan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14 (1), 115-121.

Keywords: *Presentation of Financial Reports, PDTT Village Ministerial Decree No. 136 of 2022, BUMDes Nugraha Tata Samaya*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa BUMDes Nugraha Tata Samaya tidak mengacu pada KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022 pada laporan keuangannya, serta untuk mengetahui bagaimanakah laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022 pada BUMDes Nugraha Tata Samaya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu BUMDes Nugraha Tata Samaya ini telah mengetahui terkait KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022 terkait penyajian laporan keuangan, namun belum dapat menyesuaikan hal tersebut. BUMDes ini juga tidak dapat menggunakan aplikasi untuk menyajikan laporan keuangan, hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki serta dengan demikian laporan keuangan yang dibuat masih banyak terdapat kekeliruan hasil dan jenis laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes.

Abstract

This research aims to find out why BUMDes Nugraha Tata Samaya does not refer to Decree of the Minister of Village PDTT No. 136 of 2022 in its financial reports, as well as to find out how quality financial reports are in accordance with Decree of the Minister of Village PDTT No. 136 of 2022 on BUMDes Nugraha Tata Samaya. This research is a type of qualitative descriptive research which is collected not in the form of numbers, but data comes from interview scripts, field notes, personal documents, notes, memos and other official documents. The results obtained in this research are that BUMDes Nugraha Tata Samaya is aware of the PDTT Village Ministerial Decree No. 136 of 2022 regarding the presentation of financial reports, but has not been able to adjust this. This BUMDes also cannot use applications to present financial reports, this is due to the lack of human resources they have and thus the financial reports made there are still many errors in the results and types of financial reports made by BUMDes.

Pendahuluan

Kemajuan dibidang ekonomi tidak hanya diprioritaskan untuk wilayah perkotaan tetapi secara merata harus sampai ke wilayah pedesaan. Salah satu cara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan fadalah melalui pertumbuhan lembaga mikro

desa dan salah satu lembaga mikro di wilayah pedesaan yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008) dalam (Sukriani et al., 2018) Pendirian BUMDes merupakan salah satu upaya pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian desa mengingat desa harus mengelola pendanaannya sendiri karena sudah menjadi daerah yang memiliki otonomi penuh (Arista et al., 2021).

Penyusunan laporan keuangan pada setiap entitas perlu dilaksanakan, tidak terkecuali pada BUMDes. Laporan keuangan menjadi gambaran penting di dalam melihat posisi keuangan dan kinerja keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Iswara (2013) dalam (Cahyani et al., 2020) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan yang berkualitas tentunya berdasar pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

BUMDes ialah lembaga ekonomi yang mempunyai identitas dan juga dasar hukum, sehingga dalam menerapkan akuntansi dan proses dalam menyusun laporan keuangan tentu harus dilandaskan pada standar yang telah ditetapkan (Wahyuningtias et al., 2021). Kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes Nugraha Tata Samaya tentunya belum memenuhi semua indikator kualitas laporan keuangan tersebut jadi laporan keuangan BUMDes Nugraha Tata Samaya keandalannya belum berkualitas karena belum mengacu pada Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022.

BUMDes Nugraha Tata Samaya dalam menyusun laporannya belum sesuai dengan standar yang berlaku karena dalam menyusun laporannya hanya membuat laporan laba rugi dan neraca sedangkan untuk memenuhi laporan keuangan lengkap yang sesuai dengan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022 yang membuat komponen laporan keuangan yang lengkap yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sehingga dapat dikatakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes Nugraha Tata Samaya belum memenuhi standar yang berlaku.

Penelitian ini difokuskan pada BUMDes karena merupakan institusi ekonomi di tingkat desa yang diupayakan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat membangun desa serta memberikan keuntungan dan menambah pemasukan bagi keuangan desa (Yusri et al., 2022). Adapun objek penelitian ini adalah BUMDes Nugraha Tata Samaya yang berada di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi ini atas dasar pertimbangan karena BUMDes Nugraha Tata Samaya ini BUMDes pertama yang berdiri di Kecamatan Gerokgak yaitu berdiri sejak 27 November 2007 dan baru memiliki asset sebesar 2.646.384.140,73 per 31 Desember 2021 sedangkan BUMDes lain salah satunya BUMDes Sari Nadi yang berdiri belakangan pada tahun 2014 sudah memiliki asset sebesar Rp 7.375.337.644 per 31 Desember 2021

BUMDes Nugraha Tata Samaya ialah lembaga ekonomi yang mempunyai identitas dan juga dasar hukum, sehingga agar penyajian laporannya berkualitas perlu mengacu pada kebijakan KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022. Oleh karena itu diperlukan analisis penyajian laporan keuangan yang mengacu pada KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022 sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas

Sesuai dengan pemaparan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui mengapa BUMDes Nugraha Tata Samaya tidak mengacu pada KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022 pada laporannya. (2) Untuk mengetahui bagaimanakah laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022 pada BUMDes Nugraha Tata Samaya.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Nugraha Tata Samaya di Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data pendukung yang relevan. Untuk mendukung data tersebut diterapkan beberapa metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu ketua BUMDes serta bendahara BUMDes Nugraha Tata Samayaat Sembung yang. Metode dan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan analisis penarikan kesimpulan.

Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diproses melalui beberapa sumber. Menurut (Moleong, 2007) dalam (Suantari, 2022), triangulasi dapat dilakukan saat pengumpulan data seperti wawancara yang dipadukan dengan dokumen yang terkait.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi dan mengambil dokumentasi untuk mengetahui mengapa BUMDes Nugraha Tata Samaya tidak mengacu pada KepmenDesa PDPTT No 136 tahun 2022 pada penyajian laporan keuangan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Putu Adi Suweca, selaku ketua BUMDes Nugraha Tata Samaya dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan yang dilaksanakan pada hari Senin, 9 Oktober 2023 bertempat di kantor BUMDes Nugraha Tata Samaya disajikan sebagai berikut :

“kami membuat laporan keuangan setiap tahun sebagai cerminan hasil dari kinerja BUMDes pada setiap tahunnya dik, jadi penyajian laporan keuangan BUMDes ini disusun berdasarkan adanya neraca dan kami juga melampirkan laba rugi yang dimiliki BUMDes Nugraha Tata Samaya”.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan BUMDes Nugraha Tata Samaya sudah disusun setiap tahunnya, tetapi BUMDes Nugraha Tata Samaya hanya melampirkan neraca dan laba rugi. Sedangkan untuk memenuhi laporan keuangan lengkap yang sesuai dengan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan KepmenDesa PDPTT No 136 Tahun 2022. Sehingga dapat dikatakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh BUMDes Nugraha Tata Samaya belum memenuhi kebijakan yang berlaku.

Bapak Putu Adi Suweca, selaku ketua BUMDes Nugraha Tata Samaya juga mengatakan.

“pembuatan laporan keuangan pada BUMDes kami ini dikerjakan sesauai dengan kemampuan petugasnya saja. Bisa dikatakan petugas kami hanya mengerjakan secara sederhana dan bisa dikatakan sesuai pengertian yang dimiliki oleh petugas.”

Disimpulkan Laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Nugraha Tata Samaya ini masih dikatakan sangat sederhana dan hanya menjabarkan terkait dengan transaksi yang dikatakan sangat sederhana dengan nama akun yang dibuat juga sederhana, tidak hanya itu, jurnal transaksi yang dibuat juga sederhana, hanya terkait dengan keluar masuknya kas. Sehingga laporan keuangan pada BUMDes ini dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan KepmenDesa PDPTT No 136 Tahun 2022.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Bapak Putu Adi Suweca, selaku direktur BUMDes Nugraha Tata Samaya dalam kaitannya dengan latar belakang pendidikan pengurus dan karyawan yang dilaksanakan pada hari Senin, 09 Oktober 2023 bertempat di kantor BUMDes Nugraha Tata Samaya disajikan berikut :

“untuk petugas yang ada disini itu dik belum memiliki kemampuan dalam bidang akuntansinya tersebut, dapat dikatakan pengemahaman terkait laporan keuangan yang

dimiliki bisa di katakan sangat minim, terlebih lagi terkait update informasi di bidang tersebut dik.”

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sumber daya yang dimiliki oleh BUMDes Nugraha Tata Samaya masi dikatakan sangat rendah. Kurangnya sumber daya manusia ini dapat mengakibatkan lambatnya pertumbuhan dari suatu organisasi. Sumber daya menjadi salah satu faktor terpenting dalam sebuah organisasi untuk dapat mencapai tujuan yang dimiliki, hal ini sesuai dengan goal setting theory yang dimana menyampaikan bahwa suatu organisasi haru memiliki tujuan untuk meningkatkan perusahaan, salah satu cara mencapai tujuan tersebut dengan meningkatkan sumber daya manusia yang dimiliki. Jika sumber daya manusia meningkat maka kinerja dari organisasi juga meningkat.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Putu Adi Suweca, selaku ketua BUMDes Nugraha Tata Samaya terkait KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022.

“untuk peraturan tersebut dari pihak BUMDes kami telah mengetahui terkait peraturan KepmenDesa niki dik, namun kami belum bisa dalam mengoprasikan aplikasi tersebut.”.

Ketua BUMDes menyampaikan ketidak mengertian terkait penggunaan aplikasi serta pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022. Bapak Putu Adi Suweca, selaku direktur BUMDes Nugraha Tata Samaya juga menyampaikan penyebab dari kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki

“dalam hal ini dik, sumber daya manusia yang rendah ini salah satu penyebabnya yaitu pendidikan yang kurang. Kalau bicara soal pendidikan, mungkin karena keterbatasan ekonomi di desa jadi bisa sekolah tamat SMA saja sudah sangat senang, jadi pengurus dan karyawan di BUMDes Nugraha Tata Samaya ini rata-rata tamatan SMA dik”

Dalam hal ini pengurus dan karyawan yang ada di BUMDes ini rata-rata memiliki jenjang pendidikan tamatan SMA, sehingga dilihat dari segi kemampuan dalam menyusun laporan keuangan dikatakan masih sangat kurang. Pengetahuan yang dimiliki juga bisa dikatakan sangat kurang terkait dengan laporan keuangan. Pegawai yang tamatan SMA ini disebabkan karena dalam segi ekonomi di desa tersebut dikatakan kurang stabil sehingga kebanyakan masyarakat setempat hanya tamatan SMA dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dimiliki oleh BUMDes Nugraha Tata Samaya belum mengacu pada KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022. Dalam hal ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu salah satunya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh BUMDes masih sangat kurang dan dikatakan tidak memenuhi standar. Hal ini terjadi karena pegawai atau karyawan yang bekerja tidak memiliki pengetahuan dibidang akuntansi dan pembuatan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dibuat masih sangat sederhana dan tidak sesuai dengan ketentuan KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022.

Bumdes Nugraha Tata Semaya telah membuat laporan keuangan yaitu laporan perhitungan hasil usaha dan neraca. Laporan keuangan ini dibuat secara manual dan masih sederhana. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Made Parwata dalah hasil wawancara:

“Bumdes niki telah mencatat transaksi dan memuat laporan keuangan secara sederhana dan masih menggunakan perhitungan secara manual niki dik, sehingga hanya membuat 2 laporan, yaitu laporan perhitungan hasil usaha dan neraca saja. “

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa Bumdes Nugraha Tata Semaya telah menerapkan sistem akuntansi yaitu pencatatan keuangan, namun dalam pelaksanaannya jenis dan format laporan keuangan yang digunakan hanya sebatas melampirkan perhitungan hasil usaha dan neraca saja. BUMDes merupakan badan usaha milik pemerintah desa yang dimana terdapat peraturan yang mengatur mengenai laporan

keuangan yaitu Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022, sehingga nantinya BUMDes dapat menyajikan hasil laporan keuangan yang berkualitas dan efisien.

Adapun penyusunan laporan keuangan sesuai dengan KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

1. Komponen Laporan Keuangan Lengkap; laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode; laporan laba rugi selama periode; laporan perubahan ekuitas selama periode; laporan arus kas selama periode; catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain.
2. Laporan keuangan BUM Desa menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas BUM Desa. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa lain, dan kondisi sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan.
3. Periode akuntansi dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun yang bersangkutan.
4. Kelangsungan Usaha, BUMDesa menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha.
5. BUM Desa menyusun laporan keuangan atas dasar basis akrual, kecuali laporan arus kas. Transaksi atau peristiwa bisnis, diakui pada saat kejadian (bukan saat kas atau setara kas diterima) dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode kejadiannya. Basis akrual bertujuan untuk mengaitkan secara langsung dan bersamaan antara pendapatan dan beban yang timbul untuk memperoleh pendapatan.

Berdasarkan peraturan KepmenDesa PDTT No 136 Tahun 2022, maka peneliti melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan yang dibuat oleh BUMDes Nugraha Tata Samaya dengan menyesuaikan akun pada Perhitungan Hasil Usaha dan Neraca, serta membantu membuat laporan keuangan secara lengkap menggunakan aplikasi yang telah disiapkan untuk membuat laporan keuangan yang ada di BUMDes.

Pada laporan perhitungan hasil usaha atau laba rugi BUMDes Nugraha Tata Samaya, ternyata terdapat perbedaan hasil yang diperoleh. Dalam laporan perhitungan hasil usaha yang dibuat oleh BUMDes yaitu Rp. 34.777.284,- sedangkan berdasarkan aplikasi BUMDes yang sesuai dengan Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022, besar laba rugi yang diperoleh sebesar Laba Rp 43.938.100,-. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp. 9.160.816,-. Hal ini dapat dikarenakan dalam laporan perhitungan hasil usaha yang dibuat oleh BUMDes terdapat beberapa akun yang tidak dimasukkan dalam laporan laba rugi.

Pada laporan perhitungan neraca BUMDes Nugraha Tata Samaya, ternyata terdapat perbedaan hasil yang diperoleh. Dalam laporan neraca yang dibuat oleh BUMDes mempunyai jumlah Rp. 1.632.357.291,- sedangkan berdasarkan aplikasi BUMDes yang sesuai dengan Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022, besar laba rugi yang diperoleh sebesar Rp 1.502.554.634,-. Dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan sebesar Rp. 129802657,-. Hal ini dapat dikarenakan dalam laporan neraca yang dibuat oleh BUMDes terdapat beberapa akun yang perhitungannya tidak sesuai dengan Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022

Simpulan dan Saran

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan diatas, maka adapun simpulan yang dapat diuraikan pada penelitian ini adalah BUMDes Nugraha Tata Samaya tidak mengacu pada Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022 pada penyajian laporan keuangannya adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki BUMDes Nugraha Tata Samaya. Laporan keuangan yang telah disusun oleh BUMDes Nugraha Tata Samaya belum sepenuhnya mengacu pada Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022 karena laporan keuangan yang disusun hanya terdiri dari neraca dan laba rugi, BUMDes Nugraha Tata Samaya tidak mencantumkan adanya laporan perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Maka dari itu peneliti bermaksud untuk memberikan kontribusi atau membantu dalam hal penyesuaian pada akun laporan neraca dan laporan laba rugi berdasarkan Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022 dan membantu menyusun laporan perubahan modal, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) yang tidak dibuat sebelumnya. Sehingga, diharapkan kedepannya BUMDes Nugraha Tata Samaya mampu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022.

Terdapat saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu; (1) Bagi BUMDes Nugraha Tata Samaya pada tahun berikutnya diharapkan mampu menyusun laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan kebijakan Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022 menggunakan aplikasi Akuntansi BUMDesa yang sudah dikeluarkan dan meningkatkan keterampilan pegawai untuk menjalankan aplikasi tersebut. (2) Bagi Dinas BUMDes Kabupaten Buleleng diharapkan mampu memberikan pelatihan dalam menyusun laporan keuangan serta pemahaman di bidang akuntansi khususnya pada BUMDes-BUMDes yang ada di Kabupaten Buleleng. (3) Bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas topik penelitian dan diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan Kepmendesa PDTT No 136 Tahun 2022 pada BUMDes dalam penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan keakuratan dan transparansi dalam laporan keuangan.

Daftar Rujukan

- Artini, N. M. D., Wahyuni, M. A., & Herawati, N. T. (2017). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Pengimplementasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Konteks Disiplin Dari Pada Desa Tigawasa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.14108>
- Devilaksmi, A. T., Yasa, I. N. P., & Wahyuni, M. A. (2019). Implementasi Awig-Awig Dalam Kontrol Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pelaba Pura (Studi Fenomenologi Di Desa Pakraman Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha*, 10(2), 2614–1930.
- Farida, V., Jati, W., & Harventy, R. (2018). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG. *Jurnal Akademik Akuntansi*, 15018, 64–73. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jaa>
- Juliantari, N. W. E., Putra, I. G. C., & I Ketut Sunarwijaya. (2020). Internal Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 21–35.
- Kumalawati, N. N. D. D., & Atmadja, A. T. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Luran Dana Patis (Studi Kasus Pada Desa Adat Cau). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(2), 77–88. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24959>
- Merta, M. S. (2021). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Upacara Ngaben Keluarga “Nyama Sanggah” Pekarangan Arya Nyuh Aya di Pasurungan Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kelungkung Bali. *Undiksha Repository*. <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/7582>
- Negara, N. L. E. S. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Ngaben dan Metatah Massal di Banjae Samu Singapadu Kaler. *Undiksha Repository*. <http://repo.undiksha.ac.id/id/eprint/14064>
- Prabhawati, L. P. G., Atmadja, A. T., & Herawati, N. T. (2018). Pengelolaan Keuangan Upacara Ngaben dan Nyekah Massal Gratis Berdasarkan Nilai Kearifan Lokal Pasidhikaran (Studi Kasus Pada LPD Desa Adat Kedonganan, Kecamatan Kuta,

Kabupaten Badung, Bali). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 9(1), 99–110.

Rakhmawati, I. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dengan Partisipasi Stakeholder Sebagai Variabel Moderasi. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 95. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4078>

Salam, N. F. (2019). Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Dan Akuntabilitas Lingkungan Pada Mal Ratu Indah Makassar. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.37888/bjra.v2i1.103>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV.

Wijayanti, A. F. D., & Harto, P. (2019). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Atas Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi di Kota Semarang)*. <https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/3199>